



**H. BAMBANG PUDJIONO, SH.
BUPATI GROBOGAN**



**H. ICEK BASKORO, SH, MH.
WAKIL BUPATI GROBOGAN**

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAERAH
AKHIR MASA JABATAN TAHUN 2011-2016
KABUPATEN GROBOGAN PROVINSI JAWA TENGAH**

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan tanggal 29 Oktober 2015 Nomor 045.2/4189/X/2015, perihal Pemberitahuan Berakhirnya Masa Jabatan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, maka Jabatan Bupati Grobogan periode 2011-2016 telah memasuki akhir masa jabatan.

Selanjutnya sesuai Pasal 69 ayat (1) dan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa Kepala Daerah mempunyai kewajiban menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Ringkasan LPPD). Kepala Daerah menyampaikan ringkasan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada masyarakat bersamaan dengan penyampaian laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Ringkasan LPPD di akhir masa jabatan yang disampaikan kepada masyarakat merupakan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah Akhir Masa Jabatan yang selanjutnya disebut Ringkasan LPPD AMJ 2011-2016, yang memuat :

1. Ringkasan Penyelenggaraan Urusan Desentralisasi, meliputi Urusan Wajib dan Urusan Pilihan;
2. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Pembantuan; dan
3. Ringkasan Penyelenggaraan Tugas Umum Pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, penyusunan Ringkasan LPPD AMJ ini dimaksudkan untuk menginformasikan kepada masyarakat atas penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016, sehingga masyarakat dapat memberikan tanggapan dan/atau saran atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dimaksud.

Tanggapan dan/atau saran itu oleh pemerintah daerah selanjutnya digunakan sebagai bahan perbaikan program kerja dan/atau peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah. Tanggapan dan/atau saran itu disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan DPRD paling lambat 6 bulan setelah Ringkasan LPPD AMJ disampaikan.

A. DASAR HUKUM

1. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7A Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi dan Tanggapan atau Saran dari Masyarakat atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

B. GAMBARAN UMUM DAERAH

Perkembangan Pembangunan Manusia di Kabupaten Grobogan sebagai salah satu tujuan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini sesuai ketentuan UNDP dalam laporan tahunan *Human Development Report* 2001, bahwa Pembangunan Manusia diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit dari indikator

Angka Harapan Hidup (umur panjang dan sehat), indikator Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah (pengetahuan) serta indikator kemampuan daya beli masyarakat (standard hidup layak).

Pembangunan Manusia di Kabupaten Grobogan berdasarkan IPM tersebut, mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Nilai IPM Tahun 2011 sebesar 64,41 dan berada pada urutan ke 20 di Jawa Tengah. Sedangkan Tahun 2014 meningkat menjadi 67,77 dan berada pada urutan ke 19 di Jawa Tengah. Nilai IPM ini masuk pada kelas pembangunan manusia kategori SEDANG. Dengan melihat peningkatan nilai IPM tersebut, menunjukkan keberhasilan program-program Pemerintah Kabupaten Grobogan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Indikator IPM yang pertama di bidang pendidikan, yang diukur dari capaian kualitas pendidikan masyarakat berdasarkan rata-rata lama sekolah, mengalami peningkatan, di mana pada Tahun 2011 sebesar 6,18 menjadi 6,32 pada Tahun 2014, demikian juga Harapan Lama Sekolah mengalami peningkatan dari 10,79 pada Tahun 2011 menjadi 12,24 pada Tahun 2014.

Indikator IPM yang kedua di bidang Kesehatan dapat dilihat dari Perkembangan Angka Harapan Hidup, di mana Tahun 2011 terhitung sebesar 73,87 dan meningkat menjadi 74,07 pada Tahun 2014, artinya kenaikan usia lama hidup seseorang tersebut merupakan gambaran kualitas hidup masyarakat yang dicapai melalui tingkat kesehatan yang tinggi, asupan gizi yang baik serta perilaku hidup bersih dan sehat dari masyarakat.

Indikator IPM yang ketiga yaitu Kemampuan Daya Beli Masyarakat, juga mengalami perbaikan, yang ditunjukkan dengan besarnya pengeluaran riil per kapita per tahun, yaitu sebesar Rp. 8.960.730,- pada Tahun 2011 menjadi Rp. 9.303.260,- pada Tahun 2014.

Selanjutnya gambaran umum kondisi demografi. Rata-rata pertumbuhan penduduk selama 5 tahun terakhir sebesar 0,61%. Sedangkan rata-rata sex ratio sebesar 101%, yang berarti setiap 100 jiwa penduduk perempuan terdapat 101 jiwa penduduk laki-laki. Jumlah penduduk sampai dengan Semester I Tahun 2015 sebesar 1.413.108 jiwa, dengan komposisi penduduk laki-laki sebanyak 708.124 jiwa dan perempuan sebanyak 704.984 jiwa.

Gambaran umum tingkat partisipasi pendidikan masyarakat, dilihat dari peningkatan Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK), di mana pada Tahun 2011 - 2014 diketahui bahwa partisipasi pendidikan masyarakat cenderung meningkat, khususnya untuk tingkat pendidikan dasar 9 tahun. Ini menunjukkan adanya kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anaknya sampai pendidikan dasar 9 tahun semakin meningkat.

Perkembangan kesehatan masyarakat, dilihat dari indikator Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dalam 5 tahun terakhir, yang mengalami trend naik turun. Terendah terjadi pada Tahun 2011 yaitu 114,04 sedangkan tertinggi terjadi pada Tahun 2014 yaitu 188,69 yang berarti pada tahun itu terdapat kematian ibu sebesar 188 orang dari 100.000 ibu yang melahirkan bayi hidup. Begitu pula Angka Kematian Bayi lahir (AKB) dan Prevalensi Gizi Buruk Balita pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan 2014 juga mengalami naik turun.

Pembangunan di sektor Ekonomi terus mengalami pertumbuhan. Kemajuan ini dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan, dari Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2014. Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan dengan menggunakan Perhitungan Tahun Dasar 2010 berturut-turut sebesar 3,19, 5,08, 4,55 dan 4,03. Sedangkan pertumbuhan PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 8,78, 9,58, 9,23 dan pada Tahun 2014 sebesar 9,29.

Demikian juga PDRB Perkapita dengan menggunakan Perhitungan Tahun Dasar 2010, atas dasar Harga Konstan, yaitu sebesar Rp. 9.981.029,- pada Tahun 2011, Rp. 10.421.682,- pada Tahun 2012, Rp.10.829.294,- pada Tahun 2013, dan Rp.11.201.049,- pada Tahun 2014. Sedangkan PDRB Perkapita atas dasar Harga Berlaku terhitung sebesar Rp.10.521.977,- pada Tahun 2011, Rp.11.457.209,- pada Tahun 2012, Rp.12.438.403,- pada Tahun 2013, dan Rp.13.515.913,- pada Tahun 2014.

Tingkat Inflasi di Kabupaten Grobogan pada Tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami fluktuasi. Tingkat inflasi yang terendah terjadi pada Tahun 2011 yaitu 1,86% , sedangkan tertinggi pada Tahun 2014 sebesar 8,03%. Namun kenaikan ini masih di bawah tingkat inflasi di Provinsi Jawa

Tengah sebesar 8,22% dan tidak mempengaruhi perkembangan ekonomi secara makro di Kabupaten Grobogan.

Selanjutnya untuk mengetahui tingkat pemerataan pendapatan masyarakat, pada umumnya dapat dilihat dari indikator nilai Indeks Gini Ratio dan Proporsi Pendapatan yang dinikmati oleh kelompok 40% penduduk yang berpendapatan rendah sesuai Kriteria Bank Dunia.

Berdasarkan kedua indikator distribusi pendapatan masyarakat tersebut, Kabupaten Grobogan sampai dengan Tahun 2013 dalam kategori pemerataan tinggi atau ketimpangan rendah, karena angka Indeks Gini Ratio masih di bawah batas ketimpangan, yaitu 0,35. Demikian juga dilihat dari indikator Proporsi Pendapatan, sampai dengan Tahun 2013 selalu berada dalam kategori pemerataan tinggi atau ketimpangan rendah, karena prosentase pendapatan yang diterima oleh 40% penduduk yang berpendapatan rendah masih di atas batas ketimpangan, yaitu 17%.

Jumlah Penduduk Miskin dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 berdasarkan indikator makro mengalami penurunan yang cukup berarti, yaitu dari 227.778 jiwa menjadi 188.648 jiwa. Demikian halnya secara persentase penduduk miskin dari jumlah total penduduk yaitu dari Tahun 2011 sebesar 17,38%, Tahun 2012 sebesar 16,13%, Tahun 2013 sebesar 14,87% dan di Tahun 2014 sebesar 14,01%

C. KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam rangka menjalankan visi dan misi yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penjabarannya melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tentunya harus didukung pengelolaan keuangan daerah yang optimal. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah dalam wujud APBD telah dilaksanakan sesuai prinsip Keadilan, Efisiensi dan Efektifitas, Anggaran Berimbang dan Dinamis, Disiplin, Transparansi, serta Akuntabilitas.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah, disusun menggunakan pendekatan kinerja (*activity base*), yaitu suatu sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian kinerja yang mencakup masukan (*input*), keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan manfaat (*impact*) dari setiap kegiatan.

Dengan sistem anggaran yang berbasis kinerja, serta adanya keterkaitan antara program dan kegiatan yang dilaksanakan setiap tahun dengan visi, misi, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, maka setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan disamping dapat mencapai *output, outcome, impact* yang telah ditargetkan, juga diharapkan akan secara nyata dapat mendukung tercapainya tujuan dan sasaran, yang kemudian secara kumulatif akan memungkinkan tercapainya visi dan misi yang telah ditetapkan.

Secara teknis, struktur APBD Kabupaten Grobogan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Adapun struktur APBD meliputi, pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Realisasi pelaksanaan APBD Kabupaten Grobogan Tahun 2011 sampai dengan 2014, dan Tahun 2015 sampai dengan bulan September, yang meliputi Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah

Realisasi pendapatan dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan 47% yaitu dari Rp.1.163.858.404.192,- menjadi Rp.1.710.966.445.735,-. Realisasi Pendapatan APBD ini terdiri dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 10%, Dana Perimbangan sebesar 69,3%, serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 20,7% dari total Pendapatan Daerah.

Sedangkan realisasi pendapatan Tahun 2015 sampai dengan September sebesar 78,5% dari target Rp.2.006.226.129.000,-.

2. Belanja Daerah

Realisasi belanja daerah dari Tahun 2011 sampai dengan 2014 mengalami peningkatan sebesar 40,3% yaitu dari Rp.1.173.213.711.868,- menjadi Rp.1.645.804.824.542,-. Komposisi Belanja Daerah ini terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar 60,6% dan Belanja Langsung sebesar 39,4% dari total Belanja Daerah.

Sedangkan realisasi Belanja Tahun 2015 sampai dengan September sebesar 50,7% dari target Rp. 2.223.149.637.431,-.

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah digunakan untuk menutup defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Untuk itu dalam keadaan APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut yang diantaranya dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Rata-rata Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA) Tahun 2011 sampai dengan bulan September 2015 sebesar Rp.133.901.645.166,-.

II. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN DAERAH

A. VISI DAN MISI

Visi Kabupaten Grobogan tahun 2011-2016 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sebagai berikut :

"Terwujudnya Kabupaten Grobogan sebagai daerah industri dan perdagangan yang berbasis pertanian, untuk mencapai masyarakat yang sehat, cerdas dan lebih sejahtera".

Untuk mewujudkan visi tersebut telah dirumuskan 6 misi yaitu :

1. Memantapkan pembangunan infrastruktur yang mendukung pengembangan daerah, seperti jalan, jembatan, pengairan, pusat-pusat perdagangan dan perindustrian rakyat, pusat-pusat pendidikan, dan pusat-pusat pembinaan kesehatan serta infrastruktur strategis lainnya.
2. Memantapkan pembangunan di bidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumberdaya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
3. Memantapkan pembangunan di bidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja secara lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.

4. Memantapkan pembangunan ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan di bidang pertanian dalam arti luas, industri, perdagangan dan pariwisata.
5. Memantapkan upaya penciptaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) berdasarkan demokratisasi, transparansi, penegakan hukum, berkeadilan, kesetaraan gender dan mengutamakan pelayanan kepada masyarakat.
6. Memantapkan upaya pelestarian sumberdaya alam dan mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang mampu memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian.

B. ARAH KEBIJAKAN DAERAH

Sesuai dengan karakteristik daerah dan permasalahan yang ada, maka kebijakan pembangunan daerah secara umum selama 5 tahun diarahkan dalam rangka mendukung peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan menjaga kestabilan harga melalui meningkatkan penyediaan barang dan jasa bagi kebutuhan masyarakat serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Berdasarkan pada misi yang ditempuh, arah kebijakan pembangunan yang dituju secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan dan jembatan.
2. Meningkatkan sarana-prasarana ekonomi pertanian dalam arti luas, perdagangan, industri dan pariwisata.
3. Meningkatkan sarana-prasarana kesehatan.
4. Meningkatkan sarana-prasarana pendidikan.
5. Meningkatkan sarana-prasarana bidang pemerintahan.
6. Meningkatkan penyelenggaraan pendidikan merata di setiap jenjang pendidikan.
7. Meningkatkan kualitas proses pendidikan dan produk lulusan pendidikan.
8. Meningkatkan partisipasi dan peran serta aktif masyarakat dalam bidang pendidikan, pembinaan pemuda dan olah raga.
9. Meningkatkan upaya pelayanan kesehatan secara profesional dan berkualitas.
10. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan baik tenaga medis dan paramedis.
11. Meningkatkan standar pelayanan minimal dan SDP di setiap sarana kesehatan.

12. Meningkatkan produktivitas dan pemasaran produk unggulan.
13. Meningkatkan kemampuan pengelolaan bahan, teknik budidaya, pengolahan pasca panen, dan pemasaran serta kemitraan.
14. Revitalisasi peran penyuluh pertanian.
15. Meningkatkan penyediaan pupuk dan sarana produksi pertanian.
16. Meningkatkan pengawasan peredaran dan kelancaran distribusi pupuk dan pestisida.
17. Memperkuat kelembagaan pertanian, koperasi, dan kelembagaan ekonomi lainnya yang berbasis ekonomi masyarakat.
18. Meningkatkan kualitas SDM aparatur pemerintahan sesuai kompetensi yang dibutuhkan.
19. Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan.
20. Meningkatkan tata pemerintahan di tingkat desa.
21. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di berbagai bidang pelayanan.
22. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan secara demokratis.
23. Meningkatkan pengamalan ajaran agama yang dianut dan saling menghormati antar pemeluknya.
24. Meningkatkan percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan.
25. Meningkatkan pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup.
26. Meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam.
27. Mewujudkan kondisi wilayah Kabupaten Grobogan yang lebih hijau (dominasi vegetasi) dan tersedianya sumber daya air yang lebih baik.

C. PRIORITAS DAERAH

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 5 tahun (2011-2016), pembangunan Kabupaten Grobogan dibagi menjadi dua tahap pembangunan, yakni tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (2011-2013), dan tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin (2014-2016).

Secara terperinci prioritas pembangunan daerah dalam dua tahap pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Tahap kelanjutan peningkatan kualitas pelayanan publik (2011-2013) :
 - a. Percepatan penanggulangan kemiskinan;
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana umum daerah;
 - c. Perluasan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran;

- d. Memantapkan pembangunan di bidang ekonomi, melalui pengelolaan produk unggulan dan andalan di berbagai bidang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
 - e. Memantapkan pembangunan di bidang Pendidikan;
 - f. Memantapkan pembangunan di bidang Kesehatan; dan
 - g. Penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan efisien sesuai dengan prinsip *Good Governance*.
2. Tahap peningkatan perwujudan masyarakat Grobogan yang sejahtera lahir dan batin (2014-2016) :
- a. Penguatan pengelolaan potensi ekonomi lokal;
 - b. Peningkatan ketrampilan dan kewirausahaan;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan publik ;
 - d. Peningkatan pemerataan pembangunan;
 - e. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
 - f. Peningkatan kerukunan antar umat beragama dan kesetiakawanan sosial;
 - g. Peningkatan program pro rakyat (penanggulangan kemiskinan) dan program keadilan untuk semua;
 - h. Peningkatan kesadaran hukum;
 - i. Peningkatan kesadaran berdemokrasi dan berpolitik; dan
 - j. Perintisan dan pengembangan industri dan perdagangan yang terkait dengan pertanian dalam arti luas.

III. URUSAN DESENTRALISASI

Dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya berdasarkan kewenangan daerah, maka dalam pencapaian Visi-Misi senantiasa dilaksanakan berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan, di mana selama 5 tahun telah dialokasikan anggaran sebesar Rp.3.351.459.946.040,-. Untuk Tahun 2011 - 2014 terealisasi 88,8%, dan Tahun 2015 sampai dengan September terealisasi 38,2%.

Adapun untuk mengukur capaian kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, digunakan **Indikator Kinerja**

Kunci sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Pelaksanaan dan Capaian kinerja Pemerintahan Daerah diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

A. URUSAN WAJIB YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pendidikan

Pelaksanaan Urusan Pendidikan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 687.529.461.123,- dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 75,7%, sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 29,4%.

Adapun capaian kinerja Urusan Pendidikan, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), pesertanya meningkat dari 23.571 menjadi 141.881 anak.
- b. Penduduk yang berusia diatas 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara), tingkat capaian kinerja sampai dengan tahun 2014 sebesar 91,20%.
- c. Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A, tingkat capaian kinerja sebesar 112,06%.
- d. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 107,09%.
- e. Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 63,79%.
- f. Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI, tingkat capaian kinerja membaik dari 99 anak pada Tahun 2011 menjadi 68 anak pada Tahun 2014.
- g. Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs, tingkat capaian kinerjanya membaik dari 0,37% atau 248 anak menjadi 0,14% atau 100 anak.
- h. Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA, dengan tingkat capaian kinerja membaik dari 0,77% menjadi 0,47%, atau dari 235 anak turun menjadi 182 anak.
- i. Angka Kelulusan (AL) SD/MI, tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 98,82%.
- j. Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 95,62%.

- k. Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 99,37%.
- l. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 95,16% atau sebesar 22.856 siswa.
- m. Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 59,68% atau sebesar 14.008 siswa.
- n. Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV, tingkat capaian kinerja meningkat dari 62,39% atau sebanyak 8.386 guru pada Tahun 2011, menjadi 76,55% atau sebanyak 10.189 guru pada Tahun 2015.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh program-program diantaranya: Program Pendidikan Anak Usia Dini, Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun, Program Pendidikan Menengah, dan Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

2. Urusan Kesehatan

Pelaksanaan Urusan Kesehatan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 664.402.415.428, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 94%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 37,3%.

Capaian kinerja Urusan Kesehatan, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani, tingkat capaian kinerja meningkat dari 2.963 menjadi 5.548 komplikasi kebidanan yang mendapat penanganan definitif.
- b. Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 99,14% atau sebesar 22.422 ibu bersalin.
- c. Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI), tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 100% yang berarti Universal Child Immunization telah mencakup di seluruh desa dan kelurahan.
- d. Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 100%, atau setiap tahunnya kasus balita gizi buruk yang ditemukan kesemuanya mendapat perawatan.
- e. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 47,08%, atau setiap tahunnya

rata-rata sebanyak 603 penderita TBC BTA yang ditemukan dan diobati dari 1.281 penderita yang diperkirakan.

- f. Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD, tingkat capaian kinerja rata-rata mencapai 100%, atau setiap tahunnya penderita DBD yang ditemukan kesemuanya mendapat penanganan sesuai Standar Operational Procedure.
- g. Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 31,09% atau sebesar 191.062 kunjungan pasien masyarakat miskin dari rata-rata jumlah masyarakat miskin setiap tahunnya sebesar 614.590 jiwa.
- h. Cakupan kunjungan bayi, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 96,51%, atau sejumlah 21.603 bayi yang memperoleh pelayanan standar dari rata-rata jumlah seluruh bayi lahir hidup setiap tahunnya sejumlah 22.385 bayi.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin dan Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak Balita.

3. Urusan Pekerjaan Umum

Pelaksanaan Urusan Pekerjaan Umum selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 915.917.689.677,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 35,4%.

Capaian kinerja Urusan Pekerjaan Umum, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik, pada Tahun 2011 sepanjang 241,330 Km, sampai September 2015 menjadi 362,461 Km atau naik sebesar 50,19%.
- b. Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik, meningkat dari 76,29% menjadi 80% dari luas irigasi 20.155 hektar.
- c. Rumah Tangga Per Sanitasi, dengan tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 84% atau sebesar 392.764 rumah tangga.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Jalan dan Jembatan, Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong, Program

Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan, serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya.

Kondisi jalan di Kabupaten Grobogan, untuk kondisi mantap baik pada Tahun 2011 sepanjang 241,330 Km, sampai September 2015 menjadi 362,461 Km atau naik sebesar 50,19%. Kondisi mantap sedang pada Tahun 2011 sepanjang 78,388 Km, sampai September 2015 menjadi 70,883 Km. Jalan kondisi rusak ringan pada Tahun 2011 sepanjang 230,399 Km, sampai September 2015 turun menjadi 210,046 Km atau 8,83%. Jalan dengan kondisi rusak berat pada Tahun 2011 sepanjang 332,983 Km, sampai September 2015 turun menjadi 254,868 Km atau 23,46%.

4. Urusan Penataan Ruang

Pelaksanaan Urusan Penataan Ruang selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 5.166.500.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 81,6%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September baru mencapai 6,8%.

Adapun capaian kinerja Urusan Penataan Ruang, dapat dilihat dari Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB, dengan tingkat capaian kinerja sampai dengan Tahun 2014 mencapai 39,78% atau sebesar 67,23 Ha dari total luas wilayah ber HPL/HGB sebesar 169 Ha.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Perencanaan Tata Ruang dan Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

5. Urusan Perumahan

Pelaksanaan Urusan Perumahan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 20.597.265.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 85,8%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September baru mencapai 1,5%.

Capaian kinerja Urusan Perumahan, meliputi :

- a. Rumah tangga pengguna air bersih, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 82,59%, atau dari 485.746 rumah tangga, 401.177 diantaranya telah menggunakan air bersih.
- b. Rumah layak huni, dengan tingkat capaian kinerja mencapai 67,91%, atau dari 399.464 rumah, 271.272 diantaranya adalah rumah layak huni.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan diantaranya : Pembangunan Sumur Air Tanah dan Jaringan Air Minum, Penataan Kawasan Kumuh dan Pembangunan Sarana Prasarana Air Bersih.

6. Urusan Perencanaan Pembangunan

Pelaksanaan Urusan Perencanaan Pembangunan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 37.819.107.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 90%. Sedangkan realisasi Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 36,4%.

Capaian kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan, dapat dilihat dari : Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD dan RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan RKPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati, serta Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD telah terakomodasi 100%.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Perencanaan Pembangunan Daerah, Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Program Perencanaan Sosial dan Budaya.

7. Urusan Perhubungan

Pelaksanaan Urusan Perhubungan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 16.504.003.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93,4%. Sedangkan realisasi Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 61,7%.

Capaian kinerja Urusan Perhubungan, dapat dilihat dari Rasio Angkutan Darat dengan Rasio Jumlah Penumpang selama satu tahun, yaitu 1 angkutan untuk 2.008 penumpang.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan, serta Program Peningkatan Pelayanan Angkutan.

8. Urusan Lingkungan Hidup

Pelaksanaan Urusan Lingkungan Hidup selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 36.909.847.500,- dengan realisasi anggaran Tahun

2011 - 2014 sebesar 79,2%. Sedangkan realisasi untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 18,2%.

Adapun capaian kinerja Urusan Lingkungan Hidup, meliputi:

- a. Penanganan sampah, tingkat capaian kinerjanya rata-rata sebesar 41,53% atau 36.883 m³.
- b. Kebersihan, dengan indikator berupa jumlah pasar tradisional tergolong baik sesuai kriteria Adipura dibandingkan jumlah total pasar tradisional, tingkat capaian kinerjanya sebesar 43,75%, atau 7 dari 16 pasar tradisional tergolong baik sesuai kriteria Adipura.
- c. Rasio jumlah kasus lingkungan yang telah ditangani mencapai 100% atau seluruh kasus lingkungan yang ada telah diselesaikan oleh Pemerintah Daerah.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan, Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan serta Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam.

9. Urusan Pertanahan

Pelaksanaan Urusan Pertanahan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.513.000.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 87%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 66,2%.

Adapun capaian kinerja Urusan Pertanahan, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Luas lahan bersertifikat, tingkat capaian kinerjanya mencapai 41,57%, yaitu 47.369 Ha dari 113.950 Ha.
- b. Penyelesaian Kasus Tanah Negara, tingkat capaian kinerjanya dalam kurun waktu 5 tahun terakhir tidak terdapat kasus tanah negara di Kabupaten Grobogan.
- c. Penyelesaian Ijin Lokasi, tingkat capaian kinerja mencapai 100% atau 128 ijin lokasi.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah.

10. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil

Pelaksanaan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.20.418.836.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 sampai dengan 2014 sebesar 93,3%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 70%.

Adapun capaian kinerja Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil meliputi :

- a. Kepemilikan KTP, tingkat capaian kinerja sampai dengan September 2015 sebesar 90%, atau sebanyak 943.769 penduduk dari 1.048.286 penduduk wajib KTP.
- b. Kepemilikan akta kelahiran, dengan tingkat capaian kinerja sebanyak 411,69 per 1000 penduduk.
- c. Penerapan KTP Nasional berbasis NIK, telah dimulai pada Tahun 2008.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan kegiatan diantaranya : Penyelenggaraan Pelayanan Penerbitan KK dan KTP Elektronik, Peningkatan Tertib Administrasi Kependudukan dan Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan di tingkat Desa/Kelurahan.

11. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 10.307.936.000,-, dengan realisasi anggaran dari Tahun 2011 - 2014 sebesar 98,6%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 44,7%.

Adapun capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Partisipasi perempuan di lembaga pemerintah, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 46,68% atau sebesar 4.661 pekerja perempuan.
- b. Partisipasi angkatan kerja perempuan, meningkat dari 66,67% menjadi 83,88% atau dari 181.401 menjadi 349.666.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan.

12. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

Pelaksanaan Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 14.524.068.940,-, dengan

realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 87,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 34,7%.

Capaian kinerja Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, meliputi:

- a. Prevalensi Peserta KB Aktif, tingkat capaian kinerjanya meningkat dari 221.418 menjadi 237.220 peserta KB Aktif.
- b. Rasio Petugas Lapangan KB/Penyuluh KB (PLKB/PKB) di setiap desa/kelurahan, yaitu setiap 1 PLKB/PKB menangani 4 desa.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh capaian program diantaranya: Program Keluarga Berencana dan Program Pelayanan Kontrasepsi.

13. Urusan Sosial

Pelaksanaan Urusan Sosial selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.11.672.589.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 95,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 20,3%.

Adapun capaian kinerja Urusan Sosial, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi, sebanyak 31 buah.
- b. PMKS yg memperoleh bantuan sosial, tingkat capaian kinerja rata-rata sebesar 43,76%, atau 81.115 PMKS yang memperoleh bantuan dari 185.375 PMKS.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya, Program Pembinaan Anak Terlantar, serta Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo.

14. Urusan Ketenagakerjaan

Pelaksanaan Urusan Ketenagakerjaan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 7.573.200.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 97,5%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 37,9%.

Adapun capaian kinerja Urusan Ketenagakerjaan, meliputi :

- a. Pelayanan kepesertaan Jaminan Sosial bagi pekerja/buruh, tingkat capaian kinerja meningkat dari 45,50% menjadi 47,63% atau dari 2.203 pekerja menjadi 2.401 pekerja.

b. Pencari kerja yang ditempatkan, tingkat capaian kinerja meningkat dari 1.502 menjadi 5.322.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja, serta Program Peningkatan Kesempatan Kerja.

15. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Pelaksanaan Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.12.602.163.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 98,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 45,1%.

Adapun capaian kinerja Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Koperasi aktif, dengan capaian kinerja sampai September 2015 sebesar 45,22% atau dari 471 koperasi, 213 diantaranya aktif.
- b. Usaha Mikro dan Kecil, dengan capaian kinerja sampai September 2015 sebesar 99,46% atau dari 26.094 UKM, 25.954 diantaranya adalah Usaha Mikro dan Kecil.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif, serta Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah.

16. Urusan Penanaman Modal

Pelaksanaan Urusan Penanaman Modal selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 1.191.755.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 83,5%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 38,9%.

Adapun capaian kinerja Urusan Penanaman Modal, dapat dilihat dari: Realisasi Penanaman Modal sampai September 2015 sebesar Rp. 797.225.347.500,-.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi serta Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi.

17. Urusan Kebudayaan

Pelaksanaan Urusan Kebudayaan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 4.745.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 97%. Sedangkan untuk realisasi Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 59%.

Adapun capaian kinerja Urusan Kebudayaan, dapat dilihat dari indikator Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya, sebanyak 26 kali, serta pelestarian Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya dengan capaian kinerja sebesar 100% atau sebanyak 187 benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan Program Pengelolaan Keragaman Budaya.

18. Urusan Kepemudaan dan Olah Raga

Pelaksanaan Urusan Kepemudaan dan Olah Raga selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 15.792.275.000,- dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 97,4%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 60,6%.

Capaian kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga, dapat dilihat dari Rasio Lapangan Olahraga dengan jumlah penduduk, tingkat capaian kinerjanya meningkat dari 0,54 menjadi 0,84 per seribu penduduk atau dari 767 menjadi 1.180 lapangan olahraga.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga, serta Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan.

19. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Pelaksanaan Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.20.955.029.400,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 82,6%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 50,9%.

Adapun capaian kinerja Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, dapat dilihat dari indikator Kegiatan pembinaan politik daerah sebanyak 22 kali dan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP sebanyak 11 kali.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pendidikan Politik Masyarakat dan Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

20. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Pelaksanaan Urusan ini selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 459.478.227.840,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 90,5%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 56,1%.

Adapun capaian kinerja Urusan ini, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Sistem Informasi Manajemen yang telah dibuat oleh Pemda, sebanyak 29 buah.
- b. Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat, dengan capaian kinerja pada setiap tahunnya berupa survey Indeks Kepuasan Masyarakat tentang Pelayanan Perijinan Satu Pintu.

21. Urusan Ketahanan Pangan

Pelaksanaan Urusan Ketahanan Pangan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 19.738.770.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 48,1%.

Adapun capaian kinerja Urusan Ketahanan Pangan, dapat dilihat dari Ketersediaan pangan utama, dengan memakai rumus perhitungan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun dibagi jumlah penduduk dikalikan seribu, menghasilkan tingkat ketersediaan pangan sebesar 257.775 Kg per seribu penduduk.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat.

22. Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pelaksanaan Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.49.431.592.000,-, dengan realisasi anggaran

Tahun 2011 - 2014 sebesar 96,7%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 66,8%.

Capaian kinerja Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, meliputi :

- a. PKK aktif, mencapai 100% atau sebanyak 31.767.
- b. Posyandu aktif, mencapai 48,77%, atau sebanyak 795 Posyandu aktif dari total 1.630 Posyandu.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan dan Program Pengentasan Kemiskinan.

23. Urusan Statistik

Pelaksanaan Urusan Statistik selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 940.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 99,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 22,6%.

Adapun capaian kinerja Urusan Statistik, dapat dilihat dari indikator Penyusunan Buku Kabupaten Dalam Angka dan Buku PDRB Kabupaten yang selalu di susun secara rutin.

24. Urusan Kearsipan

Pelaksanaan Urusan Kearsipan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.3.938.459.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 96,7%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 59%.

Adapun capaian kinerja Urusan Kearsipan, dapat dilihat dari Penerapan pengelolaan arsip secara baku, yang telah dilaksanakan oleh semua SKPD.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi, serta Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah.

25. Urusan Komunikasi dan Informatika

Pelaksanaan Urusan Komunikasi dan Informatika selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 7.846.700.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 97,3%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 70,4%.

Capaian kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika, dapat dilihat dari indikator Publikasi Internet bagi Pemerintah Kabupaten melalui Website milik resmi pemerintah Kabupaten Grobogan, serta pameran/expo yang dilaksanakan selama 5 tahun terakhir sebanyak 97 kali.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa, serta Program Kerjasama Informasi Dengan Media Massa.

26. Urusan Perpustakaan

Pelaksanaan Urusan Perpustakaan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 4.139.065.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 96%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 46%.

Adapun capaian kinerja Urusan Perpustakaan, dapat dilihat dari Koleksi Judul Buku yang tersedia di Perpustakaan Daerah, yang meningkat dari 19.883 judul menjadi 23.017 judul. Sedangkan rata-rata Jumlah Pengunjung Perpustakaan setiap tahunnya sebanyak 13.998 pengunjung.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan, serta Program Penyelamatan dan Pelestarian Koleksi Bahan Pustaka.

B. URUSAN PILIHAN YANG DILAKSANAKAN

1. Urusan Pertanian

Pelaksanaan Urusan Pertanian selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 233.966.170.886,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 101,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 34,4%.

Adapun capaian kinerja Urusan Pertanian, dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya, rata-rata sebanyak 5,60 ton/Ha.
- b. Kontribusi sektor pertanian sangat dominan terhadap PDRB dibandingkan sektor lain, yaitu rata-rata mencapai 32,44% dari total PDRB.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan dan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan.

2. Urusan Kehutanan

Pelaksanaan Urusan Kehutanan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.13.985.516.246,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 17,6%.

Capaian kinerja Urusan Kehutanan, dapat dilihat dari indikator Kerusakan Kawasan Hutan, yang menurun dari 5.515 Ha menjadi 1.255 Ha.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan, serta Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan.

3. Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral

Pelaksanaan Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp.7.185.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 63,6%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September baru mencapai 9,2%.

Adapun capaian kinerja Urusan Energi Dan Sumberdaya Mineral, meliputi:

- a. Pertambangan tanpa ijin yang ditertibkan, dengan capaian kinerja rata-rata sebesar 50,44% atau 51,28 Ha.
- b. Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB, rata-rata mencapai 1,11%.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan Program Pembinaan dan Pengawasan Bidang Pertambangan.

4. Urusan Pariwisata

Pelaksanaan Urusan Pariwisata selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 3.295.000.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014

sebesar 97,4%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 68%.

Adapun capaian kinerja Urusan Pariwisata, dapat dilihat dari Kunjungan Wisata, selama lima tahun mencapai 601.838 wisatawan.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata, dan Program Pengembangan Kemitraan.

5. Urusan Kelautan dan Perikanan

Pelaksanaan Urusan Kelautan dan Perikanan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 11.667.807.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 94,2%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 70,2%.

Adapun capaian kinerja Urusan Kelautan dan Perikanan, dapat dilihat sebagai berikut :

- a. Produksi perikanan, capaian kinerja rata-rata sebesar 127,97% atau sebesar 1.750 ton dari target sebesar 1.367 ton .
- b. Konsumsi ikan, meningkat dari 10,80 Kg per kapita per tahun menjadi 13,48 Kg per kapita per tahun, dan selalu di atas target yang ditetapkan.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Budidaya Perikanan, serta Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan.

6. Urusan Perdagangan

Pelaksanaan Urusan Perdagangan selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 12.090.239.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 95,3%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September baru mencapai 9,6%.

Adapun capaian kinerja Urusan Perdagangan, dapat dilihat dari Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, rata-rata menyumbang sebesar 20,72%.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri, serta Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan.

7. Urusan Industri

Pelaksanaan Urusan Industri selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 14.064.195.500,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93,9%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 48%.

Adapun capaian kinerja Urusan Industri, dapat dilihat dari Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB, mencapai rata-rata sebesar 10,85%, dan Pertumbuhan Jumlah Industri, meningkat dari 0,56% menjadi 1,27%.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah, serta Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial.

8. Urusan Transmigrasi

Pelaksanaan Urusan Transmigrasi selama 5 tahun dibiayai anggaran sebesar Rp. 3.751.061.000,-, dengan realisasi anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 93,4%. Sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September mencapai 34,4%.

Adapun capaian kinerja Urusan Transmigrasi, dapat dilihat dari jumlah Transmigran Swakarsa, yaitu sebanyak 10 orang dari 147 jumlah total transmigran.

Capaian kinerja Urusan ini didukung oleh pelaksanaan program diantaranya : Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi dan Program Transmigrasi Lokal.

IV. TUGAS PEMBANTUAN

Dalam penyelenggaraan TUGAS PEMBANTUAN, Pemerintah Kabupaten Grobogan pada kurun waktu Tahun 2011 sampai dengan Tahun 2015 menerima Tugas Pembantuan dari Pemerintah Pusat melalui 9 Urusan, yang terdiri dari Urusan Kesehatan, Urusan Pekerjaan Umum, Urusan Perencanaan Pembangunan, Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, Urusan Ketenagakerjaan, Urusan Ketahanan Pangan, Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Urusan Pertanian, serta Urusan Kehutanan, dengan total anggaran sebesar Rp.313.882.988.500,- dengan serapan anggaran Tahun 2011 - 2014 sebesar 98,85%, sedangkan untuk Tahun 2015 sampai dengan September terserap sebesar 86,62%.

V. TUGAS UMUM PEMERINTAHAN

Penyelenggaraan TUGAS UMUM PEMERINTAHAN yang dilakukan Tahun 2011 sampai dengan 2015, meliputi : Kerjasama Antar Daerah, Kerjasama Dengan Pihak Ketiga, Koordinasi Dengan Instansi Vertikal di Daerah, Pembinaan Batas Wilayah, Pencegahan dan Penanggulangan Bencana, Pengelolaan Kawasan Khusus, serta Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, yang secara keseluruhan Tugas Umum Pemerintahan tersebut telah dapat dilaksanakan sesuai ketentuan yang ada.

Selain yang kami sampaikan tersebut di atas, mengenai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, perlu saya sampaikan beberapa **prestasi dan penghargaan tingkat Nasional** yang diperoleh Kabupaten Grobogan dari Tahun 2011 sampai dengan 2015, sebagai berikut :

1. Penghargaan Tingkat Nasional Transmigration Award sebanyak 3 kali.
2. Sekolah Adiwiyata Nasional sebanyak 4 kali, yaitu SMP 3 Gubug sebanyak 2 kali, SMP 1 Tegowanu dan SMP 5 Purwodadi.
3. Penghargaan Adipura untuk kategori Kota Kecil.
4. Penghargaan Nasional Kabupaten Layak Anak sebanyak 3 kali.
5. Penghargaan Nasional Anugerah Parahita Eka Praya dalam bidang Pengarusutamaan Gender sebanyak 2 kali.
6. Penghargaan Nasional Kabupaten Penggerak Koperasi dengan Peringkat Paramadhana Madya Nugraha Koperasi sebanyak 2 kali.
7. Penghargaan Tingkat Nasional Inovator Pengembangan Pemerhati Anak Berkebutuhan Khusus.
8. Penghargaan Tingkat Nasional Satya Lencana Wira Karya.
9. Juara I Tingkat Nasional Penanaman Satu Milyar Pohon.
10. Penghargaan Nasional Adhikarya Pangan Nusantara dalam bidang Pembina Ketahanan Pangan.
11. Juara I Nasional Upaya Khusus Peningkatan Produksi Padi, Jagung dan Kedelai (Pajale).
12. Juara I dan III Tingkat Nasional Lomba Situs Web Antar SKPD Lingkup Pertanian Kabupaten/Kota Seluruh Indonesia.
13. Juara III Nasional Indonesia Green Region Award dari Majalah SWA.
14. Juara Nasional Kelompok Tani sebanyak 8 penghargaan.

15. Juara I Nasional lomba Petugas Inseminasi Buatan sebanyak 2 penghargaan.

Serta banyak prestasi lainnya tingkat Provinsi.

VI. PENUTUP


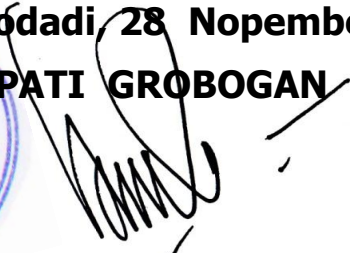
Pada kesempatan ini, ijinkan kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh masyarakat Kabupaten Grobogan, yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan daerah, serta senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban umum dalam keadaan baik dan kondusif.

Kami menyadari, bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan belum sepenuhnya dapat memenuhi aspirasi masyarakat, serta menyelesaikan persoalan-persoalan secara menyeluruh. Hal ini bukan karena tidak atau kurang memperhatikan aspirasi masyarakat, tetapi semata-mata karena keterbatasan sumber daya yang ada, dan tidak semua permasalahan dapat diselesaikan secara tuntas dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati, melalui forum ini saya mohon maaf atas segala kekurangan, dan kepada semua pihak dapat memberikan kritik, saran dan masukan yang konstruktif guna perbaikan atau peningkatan kinerja Pemerintah Daerah pada tahun-tahun mendatang.

Perlu kami tambahkan, seiring dengan akan berakhirnya masa jabatan kami, Bupati dan Wakil Bupati Grobogan, dalam waktu beberapa bulan lagi, maka kepada seluruh Masyarakat Kabupaten Grobogan, atas nama pribadi dan keluarga, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan atas segala dukungan, kerjasama, serta kritik dan sarannya. Dan juga menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan kami bersama keluarga selama bertugas sebagai Bupati dan Wakil Bupati Grobogan. Kami berdua berharap dan berdoa agar komunikasi serta jalinan silaturahmi tetap terjalin dengan baik, dan proses penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Kabupaten Grobogan tercinta ini tetap berjalan secara kondusif, dinamis dan berkesinambungan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan bimbingan lahir dan batin kepada kita semua serta

menjadikan Kabupaten Grobogan yang kita cintai ini semakin maju, mandiri, makmur, dan sejahtera. Amin.

 **Purwodadi, 28 Nopember 2015**
BUPATI GROBOGAN

H. BAMBANG PUDJIONO, SH